

## Oknum Polisi Abaikan Korban Tabrak Lari Tanda Tidak Tulus Melayani Masyarakat

JAKARTA (IM) - Anggota Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti menyebutkan oknum Polantas di Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mengabaikan korban tabrak lari, sebagai tanda bahwa anggota Korps Bhayangkara itu tak tulus melayani masyarakat.

Poengky mengomentari video viral di media sosial beberapa waktu lalu yang memperlihatkan adanya mobil dinas polisi yang mengabaikan korban tabrak lari.

"Kami sangat menyesalkan adanya berita viral terkait anggota Patwal yang diduga kurang memiliki empati untuk membantu korban kecelakaan lalu lintas, padahal sangat urgent monolog korban dan membawanya ke rumah sakit," ujar Poengky Indarti, Kamis (16/12).

Hal ini sesuai dengan tugas anggota Polri, yakni melayani, mengayomi, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum guna mewujudkan harkatibimas.

"Seharusnya anggota mengutamakan untuk melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Tindakan mengacuhkan tersebut menunjukkan dalam melaksanakan tugasnya tidak terlihat adanya ketulusan maupun sikap yang humanis," kata Poengky Indarti.

Tindakan oknum Polri yang mengabaikan korban tabrak lari itu sangat mengecewakan masyarakat. Padahal harapan masyarakat sangat tinggi kepada Polri.

"Oleh karena itu Propam diharapkan segera memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada anggota tersebut agar ada efek jera. Jika tidak berjiwa melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat, jangan jadi polisi. Sungguh sebuah ironi ketika ada anggota kepolisian lalu lintas malah tidak monolog korban kecelakaan lalu lintas," pungkasan Poengky Indarti.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, sebuah video viral di media sosial (medsos) mobil polisi lalu lintas (polantas) di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel) hanya lewat saat ada korban kecelakaan lalu lintas terkapar di jalanan.

Dalam video yang diunggah ke media sosial diketahui seorang korban tabrak lari sedang tergeletak di jalan poros Kabupaten Bulukumba-Sinjai, Kecamatan Bulukumpa Sabtu (11/12).

Di video tersebut terdengar suara sejumlah warga histeris akibat insiden tabrak lari tersebut.

Video yang direkam dari lantai dua sebuah bangunan tersebut merekam momen saat mobil kepolisian melintas.

Warga sempat mengira polisi tersebut akan memberi pertolongan. Namun, mobil patroli kepolisian tersebut hanya melambatkan lajunya saat melewati korban tabrak lari yang sedang tergeletak di jalanan kemudian kembali melaju. ● lus

# 12 | PoliceLine

IDN/ANTARA



## KAPOLRI TINJAU VAKSINASI DI POLDA GORONTALO

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers di halaman Polda Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Kamis (16/12). Kapolri melakukan kunjungan kerja dalam rangka memantau percepatan vaksinasi COVID-19 dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat di Gorontalo.

## Kapolri Minta Seluruh Polda di Indonesia Kawal Investasi, Antisipasi Potensi Masalah

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan jajarannya terus mengawal program Presisi demi mewujudkan harapan masyarakat terhadap institusi Korps Bhayangkara.

Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri itu menyebut, sinergitas dan soliditas TNI-Polri bersama, Pemda, relawan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan elemen lainnya, terus berjalan dengan baik dan bersatu padu demi mengawal seluruh kebijakan Pemerintah.

"Soliditas TNI-Polri saya kira ini kita bangun lama dan harus dilanjutkan. Karena ini kunci utama. Jangan sampai ada celah membuat TNI-Polri bisa diadu karena akan menjadi kerugian kita semua. Panglima TNI dan saya sepakat, kalau ada masalah harus ditindak tegas agar tak terulang. TNI mitra kita yang harus terus berkerjasama untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan nyaman." Kata Listyo mengemukakan.

JAKARTA (IM) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran Polda di seluruh Indonesia untuk mengawal iklim investasi. Ia meminta jajarannya untuk mengantisipasi segala potensi gangguan sedini mungkin.

Kapolri Listyo meminta jajaran harus melakukan deteksi dini dan penanganan dengan cepat terkait dengan potensi munculnya permasalahan atau gangguan keamanan dan ketertiban. Pasalnya, dalam

menghadapi situasi, harus lebih dahulu mengedepankan tindakan preventif, preventif dan yang terakhir baru represif.

"Ke depan tindakan preventif dan preventif menyelesaikan masalah, represif langkah terakhir. Polri harus hadir di tengah masyarakat. Sehingga masalah bisa diselesaikan sebelum ada potensi gangguan. Itu menjadi tugas kita," kata Listyo dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (16/12).

Listyo mengingatkan untuk terus mengawal program Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) demi mewujudkan harapan masyarakat terhadap institusi Korps Bhayangkara.

"Hal lain saya kira terkait dengan program Presisi.

Saya berharap pencapaian 100 persen tentang target kuantitas. Tinggal kualitas bisa dirasakan masyarakat. Agar kita menjadi Polri yang Presisi dan dipercaya masyarakat. Saya titipkan tanggung jawab ini dan saya yakin rekan-rekan mampu," ksats Lidsty. ● han



IDN/ANTARA

## PENGOSONGAN RUMAH DINAS POLRI

Personel Brimob Polda Metro Jaya bersitegang dengan purnawirawan polisi penghuni rumah dinas Polri saat pengosongan di Kompleks Brimob Batalyon C Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (16/12). Penertiban dan pengosongan dilakukan untuk mengembalikan fungsi awal rumah dinas bagi anggota Polri aktif.

## Pegawai dan Pensiunan BPN Ditetapkan Tersangka Kasus Mafia Tanah di Cakung

JAKARTA (IM) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus dugaan mafia tanah di Cakung, Jakarta Timur.

Sepuluh tersangka tersebut berasal dari pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), pensiunan pegawai BPN dan pihak lainnya. Mereka disangka memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan/atau pemalsuan akta otentik dan/atau pemalsuan surat.

"Iya ada sepuluh orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (16/12).

Ke-10 tersangka adalah berinisial Y, EBS, M, TPIH, SL, T, KW dan W yang merupakan Pegawai BPN. Lalu, satu orang pensiunan Pegawai BPN berinisial M dan satu warga sipil, MS.

"Mereka dijadikan tersangka berdasarkan hasil penyelidikan dan gelar perkara atas laporan dari Direktur PT. Salve Veritate, RA pada 28 Oktober 2020, dengan nomor laporan polisi: LP/B/0613/X/2020/Bareskrim," ujar Andi.

Andi menuturkan, pelapor RA selaku kuasa hukum korban PT. Salve Veritate melaporkan dugaan tindak pidana menyeruahkan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan/atau pemalsuan akta otentik dan/atau pemalsuan surat.

Menurutnya, RA melaporkan proses pembuatan Surat Keterangan (SK) Pembatalan 38 SHGB atas nama PT. Salve Veritate berikut

turunannya.

"Dan, proses penerbitan SHM Nomor 04931/Cakung L. 77.852 M2 atas nama Abdul Halim yang diduga dilakukan oleh Jaya dkk (mantan Kakanwil BPN DKI Jakarta)," ucap Andi.

Pada 12 April 2021, Andi mengatakan penyidik telah menetapkan RD (mantan Lurah Cakung Barat) sebagai tersangka, karena diduga membuat surat keterangan lurah yang isinya tidak benar/palsu.

Lalu, surat itu digunakan sebagai salah satu dasar dalam penerbitan SK Pembatalan SHGB atas nama PT. Salve Veritate sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 KUHP.

"Yang bersangkutan (mantan Lurah Cakung Barat) telah divonis bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat," tutur Andi.

Selanjutnya, Andi mengatakan penyidik melakukan pengembangan kasus ini hingga menetapkan tersangka lain karena diduga membuat surat/dokumen yang isinya tidak benar/tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk dijadikan dasar dalam penerbitan SK Pembatalan 38 SHGB berikut turunannya atas nama PT. Salve Veritate dan penerbitan SHM No. 04931/Cakung L. 77.852 M2 atas nama Abdul Halim, atas bidang tanah di Ujung Menteng, Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur.

"Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP," tutup Andi. ● lus

## Mantapkan Komunikasi Publik, Divisi Humas Polri Gelar Anev dan Konsolidasi di Jakarta

JAKARTA (IM) - Divisi Humas Mabes Polri menggelar anev dan konsolidasi dalam rangka memantapkan komunikasi publik, dengan tema "Pemantapan Komunikasi Publik Melalui Optimalisasi Media Digital Menuju Polri Yang Presisi Di Era Police 4.0" di salah satu hotel di Jakarta.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, dan dihadiri oleh pejabat utama Divisi Humas Polri dan para Kabid Humas seluruh Indonesia dan diikuti oleh seluruh Kapolres melalui zoom meeting, dan juga menghadirkan para narasumber yang berkompeten seperti Ketua harian Kompolnas, Dirjen Aptika kementerian, Dirut Jak TV, Ketua PWI, dan Dirut TV/Radio Polri.

Menurut Dedi, teknologi informasi dan komunikasi semakin erat dengan kehidupan manusia, globalisasi yang didukung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan dan mempengaruhi pola berfikir dan perilaku.

"Berbagai ancaman dan tantangan dalam era digital seperti merebaknya hoax, hate speech dan lain-lain, harus dihadapi melalui pemberitaan yang humanis, edukatif, informatif serta klarifikasi," kata Dedi dalam pembukaan anev tersebut, Kamis (16/12).

Dedi pun berharap anev dan konsolidasi Humas Polri Tahun 2021 mampu memperkuat government sosial media untuk mencegah penyalahgunaan media sosial dan kejahatan siber, pembuatan narasi yang efektif untuk amplifikasi pemberitaan serta manajemen isu dan publik speaking.

"Bagi rekan-rekan jajaran Divisi Humas dan para Kabidhumas, saya selalu mengingatkan rekan-rekan ini sebagai fungsi utama kepolisian, banyak hal yang harus kita kelola terkait masalah isu-isu, dimana dinamika masyarakat saat ini sangat cepat. Membangun komunikasi, ini merupakan bagian penting dari pekerjaan kita," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Divi Humas Polri memberikan penghargaan kepada Polda Jateng sebagai The Best Engagement Media Sosial dalam Penyebaran/Diseminasi Berita yang diterima oleh Kabid Humas Polda Jateng, AKBP Muhammad Iqbal.

"Terima kasih atas kepercayaan pimpinan Polri atas kerja keras seluruh anggota Humas Polda Jateng dan Jajarannya," kata Iqbal. ● lus

## Polda Metro Usut Dugaan Pungli Rp40 Juta Terkait Kaburnya Rachel Venny dari Karantina

JAKARTA (IM) - Polda Metro Jaya akhirnya mengusut dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp40 juta terkait kasus kaburnya selebgram Rachel Venny dari tempat karantina Covid-19.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, penyidik telah menyerahkan penyelidikan dan menyerahkan dua berkas berbeda ke Kejaksaan.

"Untuk penanganan yang kemarin itu hasilnya ada dua berkas," kata Zulpan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (16/12).

Zulpan menjelaskan, berkas pertama yang diserahkan terkait dengan kasus pelanggaran karantina yang dilakukan Rachel Venny bersama kekasihnya Salim Nauderer dan sang manajer Maulida Khairunnisa.

Sementara untuk berkas kedua berkaitan dengan tersangka Ovelina Pratiwi yang menerima uang sebesar Rp40 juta dari Rachel Venny karena membantu proses kabur dari karantina tersebut.

"Berkas yang satu itu soal Oveline," lanjutnya.

Meski begitu, Zulpan enggan membeberkan lebih lanjut dugaan pungli dalam berkas perkara Ovelina Pratiwi. Ia hanya menegaskan semua

perkara telah selesai diusut. "Semua sudah ditangani dalam pemberkasannya, hasil penanganan yang kemarin itu masuk ke dalam dua berkas," tukas Zulpan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md sebelumnya meminta agar setoran Rp40 juta yang diberikan Rachel Venny ke Ovelina Pratiwi untuk bisa kabur dari tempat karantina diusut polisi.

"Jadi yang saya baca di pengadilan itu pengakuannya, saya (Rachel Venny) bayar ke mbak ini Rp 40 juta, lalu disetor ke ASN suatu institusi itu sekian. Nanti saya mau sampaikan agar itu diusut biar enggak biasa melakukan itu," kata Mahfud.

Dalam persidangan, terdakwa kasus pelanggaran karantina Rachel Venny mengaku mengeluarkan uang puluhan juta untuk kabur dari karantina. Rachel kemudian menjelaskan dirinya dibantu oleh oknum bernama Ovelina dalam kasus ini.

"Saya membayar Rp 40 juta dan uangnya sudah dikembalikan ke saya. Waktu itu diserahkan ke Ovelina," kata Rachel dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, Jumat (10/12) lalu. ● lus

## Polda Sumut Tak Berikan Izin Keramaian untuk Acara Perayaan Tahun Baru 2022

MEDAN (IM) - Polda Sumatera Utara (Sumut) tidak akan memberikan izin keramaian saat Perayaan Tahun Baru 2022. Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

"Polda Sumut dan Polres jajaran tidak mengeluarkan izin keramaian perayaan Tahun Baru," kata Kapolda Sumut Irjen Pol RZ. Panca Putra Sumanjuntak melalui Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kamis (16/12).

Hadi mengungkapkan Polda Sumut bersama-sama Kodam I Bukit Barisan dan Pemda akan terus meningkatkan operasi yustisi selain Operasi Lilin yang nantinya diberlakukan. Pos check point, lanjutnya, Pos Pengamanan dan Pos Pelayanan pada Ops Lilin Toba juga akan diterapkan di setiap Pos.

"Operasi yustisi yang sudah berjalan selama ini akan lebih ditingkatkan lagi menjelang Natal dan Tahun Baru, berbagai langkah dan upaya pencegahan penyebaran covid-19 akan terus dilakukan, TNI-Polri tidak akan lelah menjalankan tugas ini," ungkap Hadi.

Dalam inmendagri 62 tahun 2021 terdapat berbagai aturan yang menerapkan pembatasan kapasitas pengunjung tempat hiburan, mall, tempat wisata, dan rumah ibadah.

"Kami menghimbau agar masyarakat mematuhi peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah patuhi jam operasional, kapasitas pengunjung maksimal 50 persen. Begitu juga dengan kapasitas penumpang kendaraan dan angkutan umum lainnya," sebut Hadi.

Dia juga mengimbau kepada pemilik atau pengusaha bus untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seperti, tempat duduknya tiga harus dikosongkan satu, penumpang dan sopir sudah vaksin dan menyiapkan aplikasi pedulilindungi.

"Nantinya setiap warga yang melakukan perjalanan saat Nataru ketika melewati pos check point di wilayah antar kabupaten/kota dan perbatasan Sumut akan diperiksa sertifikasinya vaksinasi melalui scan barcode aplikasi pedulilindungi," ujar Hadi.

Menurutnya, pada perayaan tahun baru 2022 bisa dipastikan tidak akan seperti perayaan-perayaan tahun baru sebelum pandemi covid 19 karena Polda Sumut dan jajaran tidak akan menerbitkan izin keramaian perayaan tahun baru dan mengumpulkan orang banyak atau kerumunan.

"Polda Sumut dan Polres jajaran tidak akan mengeluarkan izin keramaian perayaan Tahun Baru 2022," kata Hadi. ● lus



## PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono (kiri) didampingi Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Krisno Halomoan Siregar (tengah) dan Plt Deputi Bidang Pemberantasan PPAK Aris Priatno (kanan) menunjukkan barang bukti uang saat konferensi pers terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil kejahatan Narkoba di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (16/12). Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mengungkap kasus TPPU dari kejahatan narkoba dengan menyita uang tunai serta aset para tersangka dengan nominal mencapai Rp338 miliar dari tiga kasus yang berbeda.